

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian terhadap Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan adalah rangkaian tahapan sistematis dalam keseragaman perlakuan pemeriksaan dan pengujian terhadap dokumen dasar dalam realisasi belanja dan pengeluaran kas daerah secara administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dokumen Pembayaran yang diverifikasi diantaranya yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Kuitansi Pembayaran dan Bukti Pembayaran Lainnya, serta Bukti Pengesahan SPJ.
3. Dalam pelaksanaan realisasi belanja dan pengeluaran kas daerah, SPP dapat berupa SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), SPP Tambah Uang Persediaan (SPP-TU), dan SPP Langsung (SPP-LS).
4. Dalam pelaksanaan realisasi belanja dan pengeluaran kas daerah, SPM dapat berupa SPM Uang Persediaan (SPM-UP), SPM Ganti Uang Persediaan (SPM-GU), SPM Tambah Uang Persediaan (SPM-TU), dan SPM Langsung (SPM-LS).
5. Dalam pelaksanaan realisasi belanja dan pengeluaran kas daerah, SP2D dapat berupa SP2D Uang Persediaan (SP2D -UP), SP2D Ganti Uang Persediaan (SP2D - GU), SP2D Tambah Uang Persediaan (SP2D -TU), dan SP2D Langsung (SP2D - LS).
6. Pihak yang terkait dalam Prosedur verifikasi Dokumen Pembayaran diantaranya

adalah:

- a) Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi dalam hal ini Petugas verifikator dan analis keuangan yang memiliki keahlian dalam administrasi dan akuntansi pemerintahan.
- b) Bendahara Pengeluaran SKPD Pemohon.
- c) Pejabat Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD dalam hal ini adalah Kepala SKPD atau pejabat yang diberi kuasa sebagai PPK (PPK).

7. Prosedur Verifikasi Dokumen Pembayaran pada BPKAD Kabupaten Pesisir

Selatan diantaranya terdiri dari:

- a) Penerimaan Dokumen Pengajuan Pembayaran
- b) Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen
- c) Pemeriksaan Kesesuaian dan Validasi Data
- d) Pemeriksaan Legalitas dan Otorisasi
- e) Pencatatan dan Rekomendasi Verifikasi

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa verifikasi dokumen pembayaran di BPKPAD berperan strategis dalam menjaga tertib administrasi, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun prosedurnya sudah cukup baik dan sistematis, tantangan utama berada pada keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya kedisiplinan OPD dalam pengajuan dokumen. Penerapan sistem digital dan penguatan koordinasi antar instansi merupakan solusi utama yang perlu terus ditingkatkan. Evaluasi rutin terhadap pelaksanaan SOP juga penting dilakukan agar proses verifikasi terus berkembang sesuai kebutuhan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan mengenai Prosedur Verifikasi

Dokumen Pembayaran pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Diharapkan BPKPAD dapat secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi petugas verifikator dan analis keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis dalam administrasi serta akuntansi pemerintahan, sehingga proses verifikasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

2. Optimalisasi Penerapan Sistem Digital

Perlu dilakukan percepatan dalam implementasi sistem digital dalam proses pengajuan dan verifikasi dokumen pembayaran. Dengan sistem digital, diharapkan proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan meminimalisir terjadinya kesalahan maupun keterlambatan akibat proses manual.

3. Koordinasi Antar Instansi

Disarankan agar BPKPAD meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sosialisasi secara berkala mengenai prosedur dan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran perlu dilakukan agar seluruh pihak memahami dan disiplin dalam memenuhi persyaratan administrasi baik dari segi kelengkapan, ketepatan waktu, maupun kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dengan pelaksanaan saran-saran di atas, diharapkan proses verifikasi dokumen pembayaran di BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan lebih tertib, sehingga mendukung tercapainya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

